

Menjadi Akar Perekonomian Nasional, Menko Airlangga Dorong Koperasi Terus Tumbuh dan Beregenerasi



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SIARAN PERS

HM.4.6/445/SET.M.EKON.3/12/2024

Menjadi Akar Perekonomian Nasional, Menko Airlangga Dorong Koperasi Terus Tumbuh dan Beregenerasi

Jakarta, 19 Desember 2024

Hingga penghujung tahun 2024, kondisi ekonomi Indonesia masih solid yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi masih di atas 5% dimana secara kumulatif sd. Q3-2024 sebesar 5,03%, diiringi inflasi terkendali dalam target sasaran $2,5\% \pm 1\%$ dimana inflasi November 2024 sebesar 1,55% (yoy). Konsumsi rumah tangga juga tetap tumbuh kuat, dan diharapkan dapat tumbuh di atas 5% tahun ini.

Selain itu, dorongan kondisi daya beli masyarakat masih relatif kuat, tercermin dari IKK (Index Keyakinan Konsumen) BI November 2024 yang tercatat sebesar 125,9. Sejalan dengan IKK yang optimis, data terbaru dari NielsenIQ menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin gemar belanja dengan total spending di Q3 mencapai Rp256 triliun.

“Pemerintah berupaya terus menjaga daya beli dan daya saing usaha, melalui sejumlah Paket Stimulus Ekonomi yang ditujukan bagi rumah tangga berpendapatan rendah, kelas menengah, dan juga dunia usaha,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Musyawarah Nasional Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis (19/12).

Pemerintah juga terus mendorong pemberdayaan UMKM dan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Diperlukan penguatan sumber daya manusia melalui adopsi teknologi, dan perbaikan tata kelola untuk meningkatkan daya saing koperasi dalam ekosistem ekonomi nasional.

“Tentu kami sangat berharap bahwa koperasi bisa terus bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga mendorong sektor produktif sesuai dengan amanat Undang-Undang Koperasi,” ujar Menko Airlangga.

Saat ini sebagian besar lapangan usaha koperasi berasal dari sektor jasa keuangan (66%) dan perdagangan (17%), sementara sektor riil seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan masih minim. Karena itu optimalisasi sektor produksi diperlukan untuk meningkatkan volume usaha koperasi.

“Sektor produksi diharapkan bisa mempekerjakan banyak orang dan tentunya sektor produksi bisa menambah supply barang di dalam negeri. Kita berharap bahwa proporsi daripada industri ataupun produsen dari DEKOPIN, induk koperasi, itu semakin meningkat. Jumlah kewirausahaan, arahan Bapak Presiden, ini harus didorong untuk naik kelas dan salah satu sumbernya tentu dari DEKOPIN,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah mendorong kemudahan pembiayaan untuk koperasi dan UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah. Per 30 November 2024, realisasi KUR mencapai Rp269,48 triliun, atau 96,24% dari target 2024, dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) terjaga di 2,19%.

Selain itu, Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di Kementerian Koperasi menyediakan akses pendanaan bagi koperasi, dengan penyaluran sektor riil yang meningkat dari Rp38,7 miliar pada 2020 menjadi Rp506,2 miliar pada 2023, tumbuh 960,53%.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga berharap koperasi dapat beradaptasi dengan industri digital. Karena digitalisasi koperasi akan menambah efisiensi dan kekuatan keanggotaan koperasi dimana akan terhubung tidak hanya dari segi rantai pasok, tetapi juga tergabung secara *network* dan data digital, sehingga bagi pengguna dasar aksesnya akan terbuka lebar.

“Saya tentu sangat berharap, sekali lagi, DEKOPIN menjadi game changer untuk menambah kewirausahaan di Indonesia dan utamanya kewirausahaan bagi kaum mayoritas. DEKOPIN terus tumbuh, terus kuat, dan terus beregenerasi, supaya kegiatan koperasi bisa terus menjadi akar daripada perekonomian nasional,” pungkas Menko Airlangga. (dlt/fsr)

**Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto**

Website: www.ekon.go.id

Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, & YouTube: @PerekonomianRI

Email: humas@ekon.go.id

LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia